



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARNO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **626494**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 768.000.000

1. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah Seluas 132 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 423 m2/168 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 360.000.000
4. Tanah Seluas 771 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.500.000

1. MOTOR, HONDA X1BO2NO4LO A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125 TRF Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, SUZUKI FD125 XSD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.800.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 20.618.958**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 909.918.958



III. HUTANG

Rp. 190.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 719.918.958

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.